

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA BILYET GIRO SEBAGAI  
WARKAT BANK MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA (PBI)  
NO. 18/41/PBI2016 TENTANG BILYET GIRO  
( Studi Pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar )**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

**FAKHRUL HIDAYAT**

**1410112036**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**



**Pembimbing ;**

**Hj. Zahara, S.H., M.H**

**Andalusia, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA BILYET GIRO SEBAGAI  
WARKAT BANK MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA (PBI)  
NO. 18/41/PBI2016 TENTANG BILYET GIRO ( STUDI PADA KANTOR  
PERWAKILAN BANK INDONESIA SUMBAR )**

(Fakhrul Hidayat, 1410112036, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program  
Kekhususan Hukum Perdata Bisnis (PK II), 63 halaman – Tahun 2019)

Pembimbing : Hj. Zahara S.H., M.H dan Andalusia, S.H., M.H

**ABSTRAK**

Bilyet Giro menurut pasal 1 butir (3) PBI no 18/41/PBI/2016 adalah surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Dengan demikian pembayaran bilyet giro adalah pembayaran dengan pemindahbukuan (booking transfer) dan bukan dengan uang tunai. Dasar pertimbangan penerbitan PBI No. 18/41/PBI/2016 ini adalah untuk meningkatkan perlindungan bagi pengguna Bilyet Giro dan meningkatkan daya tarik dari penggunaan Bilyet Giro dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan serta memberikan jaminan keamanan dan kepastian penggunaan Bilyet Giro. Dalam transaksi Bilyet Giro ini masih ada kasus-kasus dari pelanggaran yang terjadi, maka untuk itu perlu perlindungan hukum yang diberikan. Rumusan masalah: 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna Bilyet Giro menurut Bank Indonesia? 2. Apa kendala yang dihadapi dalam penggunaan Bilyet Giro sebagai warkat bank menurut Bank Indonesia?. metode penelitian yang dipakai ialah pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu : 1. Berdasarkan hasil analisis dan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak bank Indonesia provinsi Sumatra barat, dimana bank Indonesia tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada nasabah pemilik bilyet giro apabila terjadi kecurangan, karena bank Indonesia sendiri merupakan sebagai lembaga yang menyusun kebijakan terkait system pembayaran, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh bank Indonesia kepada nasabah pengguna bilyet giro berada di level preventif, yakni melalui berbagai macam peraturan yang harus dipenuhi. 2. Berdasarkan analisa dan wawancara yang dilakukan penulis di bank indonesia perwakilan sumbar mengenai kendala yang dihadapi dalam penggunaan bilyet giro sebagai warkat bank menurut Bank Indonesia kantor wilayah sumatra barat mengatakan tidak ada karena para pelaku bilyet giro yang terlibat langsung ialah antara pihak bank dengan pemilik rekening giro perseorangan maupun perorangan, bank indonesia dalam kegiatan transaksi bilyet giro ini hanya bertugas sebagai pengawas yang bersifat pasif, dengan kata lain pelaku aktif bilyet giro melibatkan pihak pemilik rekening dan perbankanya masing masing. Oleh sebab itu kendala-kendala yang dirasakan terdapat kepada para pihak nasabah pengguna bilyet giro dengan bank terkait.